

BAB VI

PERENCANAAN STRATEGIS

6.1. Faktor Penentu Kesuksesan

Rencana jangka panjang dengan strategi yang jelas sangat penting dalam implementasi e-government, singkatnya keberhasilan e-government ditentukan oleh faktor – faktor berikut.

- E-Leadership yang kuat dari top management, middle management, dan bottom management dalam implementasi e-government. Hal ini menandakan mulai dari visi, strategi, perencanaan, pengembangan, sampai dengan evaluasi akan berjalan dengan baik dan sinergi di semua level pimpinan daerah. E-leadership juga menandakan di semua tingkatan pimpinan memiliki kemampuan dasar kepemimpinan yang baik seperti komunikasi, kemampuan koordinasi, komitmen, inovasi, dll.
- Visi yang jelas dari semua tingkatan pimpinan daerah. Jika pimpinan tidak memiliki pemahaman yang baik tentang TIK, maka pembangunan e-government tidak akan terealisasi dengan baik, karena tidak adanya visi yang jelas dari pimpinan. Dengan e-leadership yang kuat maka visi ini akan diketahui dan dilaksanakan oleh semua stakeholder.
- Dukungan yang kuat dari masyarakat. Dukungan dari masyarakat dalam bentuk penggunaan layanan e-government ini sehingga masyarakat merasakan manfaatnya, akan membuat pelaksanaan e-govt. lebih cepat dari yang direncanakan. Sayangnya sampai saat ini Indonesia masih terkendala dengan masalah kesenjangan digital, artinya masih banyak masyarakat yang belum terjangkau dengan layanan TIK.
- Hukum dan Peraturan Daerah. Peraturan daerah maupun Peraturan Walikota sangat penting dalam suksesnya implementasi e-govt. Hukum dan peraturan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk membuatnya. Tanpa hukum dan aturan dari pemerintah adalah sebuah keniscayaan e- government dapat diterapkan dengan optimal. Minimal aturan hukum berikut ini perlu dirancang demi keberhasilan e-government:
 - 1) Aturan antar lembaga dan kelembagaan pengelola TIK dan koordinasinya.
 - 2) Aturan perubahan proses bisnis kerja pemerintahan.
 - 3) Aturan TIK Pemerintah Daerah.
- Struktur Organisasi. Restrukturisasi organisasi cukup berpengaruh untuk kesuksesan implementasi e-government. Penyesuaian atau perbaikan dalam struktur organisasi perlu

direncanakan dengan matang dan diimplementasikan dengan sistematis. Hal-hal penting yang mempengaruhi perubahan organisasi adalah sebagai berikut : Kepemimpinan yang kuat dengan komitmen; Perencanaan manajemen TIK dan manajemen perubahan; Persiapan anggaran dan pelaksanaan anggaran; Koordinasi dan kolaborasi; Pemantuan dan pengukuran kinerja; dan Kemitraan pemerintah-sektor swasta-masyarakat. Restrukturisasi organisasi pada pemerintahan bukanlah hal mudah, dibutuhkan tekad kuat dari pimpinan pemerintah. Beberapa resiko yang muncul adalah hilangnya sebuah fungsi atau struktur dan jabatan kerja tertentu karena berubahnya proses bisnis dan orientasi layanan yang ada. Resistansi yang muncul dari dalam itu sendiri dapat menjadi faktor kegagalannya.

- Proses Bisnis Pemerintahan. Dengan adanya TIK maka diperlukan inovasi dan penyesuaian menjalankan bisnis pemerintahan. Hal ini akan memaksa semua jajaran pemerintahan untuk beradaptasi dengan sistem baru yang dijalankan dengan menggunakan teknologi. Artinya perlu perubahan budaya kerja di pemerintahan. Jika aparatur pemerintahan tidak siap untuk beradaptasi dengan sistem yang baru akan mengakibatkan sistem tidak dapat bekerja secara optimal.
- Perkembangan Teknologi Informasi Komunikasi yang begitu cepat. TIK telah mengubah gaya hidup masyarakat perkotaan. Dengan demikian Pemerintah Kota harus segera menyesuaikan layanannya, yaitu layanan berbasis TIK. Sehingga pemerintah wajib memperhatikan pemilihan teknologi dan pelaku bisnis TIK berdasarkan kesesuaian teknologi dengan aplikasi yang diperlukan, interoperabilitas, teknologi pendukung, standarisasi, ketersediaan purna jual, umur teknologi, kompatibilitas, dan lisensi. Pemilihan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini dan prediksi kebutuhan 5 (lima) tahun kedepan akan sangat menentukan keberhasilan implementasi e-government.

6.2. Visi dan Misi Pengembangan E-Government

Berdasarkan analisa kondisi eksisting, analisa resiko, analisa SWOT, dan analisa strategis, maka visi dan misi pengembangan e-government yang diusulkan berikut ini.

Visi Pengembangan E-Government

“Terwujudnya Denpasar sebagai Kota Cerdas (Smart City) Berwawasan Budaya melalui penyelenggaraan i-Government ”.

Huruf ‘i’ pada iGovernment atau iGovt menunjukkan kebutuhan Kota Denpasar akan ‘integrated Government’, ‘innovated Government’, dan ‘intelligent Government’,

Misi Pengembangan E-Government

- 1) Mengembangkan sistem TIK terintegrasi dan terpadu untuk mewujudkan tata kelola e-government yang baik.
- 2) Meningkatkan pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis TIK.
- 4) Menumbuhkan kearifan lokal dan budaya lokal masyarakat Kota Denpasar dengan pemanfaatan TIK.
- 5) Meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan pemahaman dan penguasaan TIK.

Tujuan dan Sasaran

Misi 1: Mengembangkan sistem TIK terintegrasi dan terpadu untuk mewujudkan tata kelola e-government yang baik.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Terimplementasikannya e-government menuju good government	Melengkapi dokumen dan regulasi sinergi implementasi e-government terintegrasi	1) Jumlah regulasi 2) Jumlah dokumen seperti framework, SOP, dll. 3) Persentase SKPD yang memanfaatkan TIK
2. Optimasi pengorganisasian TIK Pemkot Denpasar	Meningkatnya pengelolaan TIK Pemkot Denpasar	1) Persentase perubahan struktur organisasi 2) Pengembangan kelembagaan TIK
3. Terbangunnya jejaring pengembangan TIK	1) Jejaring internal / Intranet 2) Jejaring eksternal / Internet	1) Jumlah Jejaring internal pengembangan TIK 2) Jumlah jejaring eksternal pengembangan TIK
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK	Meningkatnya SDM pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK	Jumlah dan sebaran optimal SDM pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK di semua SKPD
5. Meningkatkan budaya birokrasi berbasis elektronis yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan staf Pemkot untuk membangun e-government	Berubahnya proses birokrasi manual ke elektronis	1) Jumlah aplikasi termanfaatkan sebagai hasil perubahan proses manual ke elektronik. 2) Jumlah staf Pemkot yang menggunakan akun email resmi Pemkot Denpasar
6. Peningkatan efisiensi di semua anggaran rutin pemeliharaan dan pengadaan TIK	Meningkatnya efisiensi anggaran pembangunan dan pengadaan TIK Pemkot.	Persentase penurunan anggaran rutin terkait otomatisasi perkantoran.
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan Internet / Intranet di Pemerintahan	Meningkatnya kecepatan Internet / Intranet di Pemerintahan	1) Kecepatan download / upload Internet dan Intranet 2) Jumlah downtime per tahun.
8. Meningkatnya pemanfaatan	Meningkatnya jenis pemanfaatan	Jumlah jenis pekerjaan dengan

Internet / Intranet untuk pemerintahan	Internet / Intranet	memanfaatkan Internet / Intranet
9. Meningkatkan keamanan informasi	1) Pengamanan aset informasi pemerintah daerah 2) Kepedulian karyawan Pemkot pada isu keamanan informasi.	1) Penurunan kejadian malware, virus, dll. 2) Jumlah kehilangan data atau informasi.
10. Meningkatkan sarana prasarana pemanfaatan Internet di masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan Internet.	Jumlah titik - titik wifi Pemkot di lokasi umum seperti taman kota, pasar, sekolah, dll.
11. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi / aplikasi dalam pemerintahan	Meningkatnya pemanfaatan aplikasi untuk tugas – tugas pemkot. Meningkatnya jumlah layanan pemerintah berbasis elektronik	Jenis birokrasi pemerintah yang menggunakan aplikasi / sistem informasi
12. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data elektronik pemerintah yang terintegrasi	Meningkatnya pemanfaatan pusat data	Jenis data yang dimanfaatkan bersama seluruh SKPD dan unit Pemkot. Kapasitas NOC (Network Operation Center)
13. Meningkatkan pengawasan Pimpinan Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	Meningkatnya kebijakan dan program yang tepat sasaran	Jumlah sistem dan aplikasi pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program Pemkot
14. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan Pemkot	1) Meningkatnya kecepatan dan keakuratan informasi yang dihasilkan. 2) Meningkatnya kecepatan dalam pengambilan keputusan. 3) Meningkatnya kecepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan.	1) Jumlah sistem dan aplikasi untuk pengambilan keputusan (dashboard eksekutif) 2) Jumlah dan model laporan yang menjadi kebutuhan semua SKPD, unit, dan Pimpinan Pemkot yang dihasilkan oleh sistem dan aplikasi pengambil keputusan 3) Jumlah sistem dan aplikasi yang sudah terintegrasi untuk aplikasi pengambil keputusan.
15. Meningkatkan sarana prasarana pemanfaatan TIK untuk pengawasan lingkungan Kota	Terwujudnya lingkungan kota yang bersih, tertib, aman, dan nyaman	1) Jumlah titik - titik CCTV / IP Camera terintegrasi dengan Lampu Penerangan Jalan dan Wifi Pemkot di lokasi umum / publik 2) Jumlah titik – titik sensor terintegrasi dengan LPJ, wifi, dan CCTV di lokasi umum / publik untuk penataan parkir, dll.

Misi 2: Meningkatkan pelayanan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan TIK.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
16. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kecepatan pelayanan berbasis elektronik pada masyarakat	Waktu pelayanan
17. Meningkatkan fasilitas pemanfaatan Internet di masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan Internet.	Jumlah akses wifi Pemkot di lokasi umum / publik oleh masyarakat
18. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi / aplikasi dalam pelayanan publik	1) Meningkatnya pemanfaatan aplikasi 2) Meningkatnya jumlah layanan	1) Jenis layanan publik dari pemerintah yang menggunakan aplikasi /

	pemerintah berbasis elektronis untuk masyarakat	sistem informasi 2) Jumlah akses ke aplikasi oleh masyarakat
--	---	---

Misi 3: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis TIK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
19. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi bagi usaha kecil dan menengah yang terintegrasi dengan layanan pemerintah	Meningkatnya transaksi elektronik untuk usaha kecil dan menengah	1) Jumlah aplikasi layanan usaha 2) Jumlah transaksi elektronik
20. Meningkatkan UMKM kreatif berbasis TIK	Meningkatnya industri – industri kreatif yang memanfaatkan TIK	1) Jumlah industri kreatif yang menggunakan TIK (software house, production house, animasi, dll.) 2) Jumlah jenis produk kreatif.

Misi 4: Menumbuhkan kearifan lokal dan budaya lokal masyarakat Kota Denpasar dengan pemanfaatan TIK

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
21. Meningkatkan nilai, keragaman, dan kekayaan budaya lokal	Berkembangnya nilai, keragaman, dan kekayaan budaya lokal	Jumlah data atau informasi tentang nilai, keragaman, dan kekayaan budaya lokal yang bisa diakses dari Internet
22. Melestarikan nilai, keragaman, dan kekayaan budaya lokal	Eksistensi nilai, keragaman, dan kekayaan budaya lokal	1) Jumlah digitasi bahan atau dokumen nilai, keragaman, dan kekayaan budaya Kota Denpasar 2) Jumlah aplikasi untuk pelestarian budaya lokal 3) Jumlah aplikasi untuk pengelolaan kekayaan budaya

Misi 5: Meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan pemahaman dan penguasaan TIK.

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
23. Meningkatkan pemantauan pemanfaatan TIK di masyarakat / dunia usaha	Meningkatnya Internet sehat. Meningkatkan peran TIK untuk pemanfaatan dunia usaha dan layanan masyarakat.	Jumlah hits pemanfaatan situs Pemerintah Kota.
24. Meningkatkan pemanfaatan TIK di masyarakat / dunia usaha	Meningkatnya penguasaan TIK oleh masyarakat	Jumlah komunitas TIK (hacker, relawan, dll.) Jumlah aktivitas kelompok masyarakat yang memanfaatkan TIK berbasis wilayah.
25. Meningkatkan penyediaan dan penyebaran informasi pembangunan	Meningkatnya frekuensi masyarakat yang mengakses informasi pembangunan	Jumlah pemohon data /informasi kepada Pemerintah Kota
26. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kota	Meningkatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah Kota	Jumlah aplikasi untuk interaksi Pemkot dengan masyarakat Jumlah pengaduan dan usulan warga melalui media TIK.

Untuk mencapai sasaran yang yang dimaksud dari kelima misi pengembangan e-government tersebut diatas, maka perlu dikaji dan ditentukan kebijakan apa saja yang diperlukan melalui analisa SWOT, dokumen perencanaan Pemkot Denpasar, pengarahannya pimpinan serta informasi lain yang memungkinkan untuk masuk dalam analisa kebutuhan ini. Dari hasil kajian kebijakan, nantinya akan diuraikan kegiatan beserta uraian output, input serta indikator capaian kinerja kegiatan.

6.3. Analisis SWOT untuk Perencanaan Strategis

Analisis SWOT untuk menentukan strategi – strategi yang diperlukan diinventarisir pada Tabel 6.1 sebagai berikut.

Tabel 6.1. Strategi Pengembangan e-Government berdasarkan Analisis SWOT

Kekuatan	Peluang	Strategi S-O
1) Pimpinan Pemkot memiliki e-leadership 2) Adanya regulasi daerah terkait kebijakan TIK dan e-Government 3) Adanya Dinas Kominfo. 4) Banyaknya aplikasi yang sudah dibangun SKPD. 5) Infrastruktur jaringan Intranet dan Intranet sudah ada. 6) Infrastruktur jaringan Internet sudah sampai ke seluruh SKPD dan Kecamatan. 7) Memiliki sumber daya memadai untuk pembangunan e-govt dan smart city. 8) Beberapa kali mendapatkan award dan nominasi untuk pembangunan e-govt.	1) Peningkatan tuntutan kinerja Pemkot untuk layanan masyarakat yang baik 2) Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional. 3) Adanya indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan kota. 4) Peningkatan peran e-govt dalam membangun Smart City. 5) Perhatian dan dorongan Pemerintah Pusat dan Swasta terhadap pengembangan e-government daerah.	1) Penempatan pimpinan yang peduli dan paham e-govt dan smart city di semua SKPD dan Badan untuk mempercepat transformasi birokrasi dan mendorong tercapainya good governance 2) Peningkatan kewenangan dan tugas Diskominfo untuk melengkapi berbagai regulasi, dokumen, dan SOP untuk efisiensi, efektifitas, koordinasi, dan sinergi pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK di semua SKPD, Badan, dan unit kerja Pemkot Denpasar. 3) Adanya kebijakan, peraturan, dan instrumen dari pimpinan daerah sebagai alat kontrol dan monitoring integrasi dan sinergi implementasi e-govt terpadu. 4) Restrukturisasi Organisasi untuk optimasi pengembangan dan pengelolaan TIK. 5) Kerjasama intens dengan stakeholder (instansi pusat, pemerintah daerah lain, swasta) untuk pengembangan e-government dalam membangun Smart City.

Kekuatan	Tantangan	Strategi S - T
1) Pimpinan Pemkot memiliki e-leadership 2) Adanya regulasi daerah terkait kebijakan TIK dan e-Government 3) Adanya Dinas Kominfo.	1) Kesenambungan pembangunan e-govt akibat dinamika politik di pucuk pimpinan. 2) Menanamkan kesadaran kepada publik tentang	1) Adanya perencanaan jangka panjang 10 tahun pengembangan e-govt yang komprehensif dan berkesinambungan yang disepakati oleh seluruh SKPD dan disetujui serta disahkan oleh pimpinan daerah (Walikota dan DPRD).

<p>4) Banyaknya aplikasi yang sudah dibangun SKPD.</p> <p>5) Infrastruktur jaringan Intranet dan Intranet sudah ada.</p> <p>6) Infrastruktur jaringan Internet sudah sampai ke seluruh SKPD dan Kecamatan.</p> <p>7) Memiliki sumber daya memadai untuk pembangunan e-govt dan smart city.</p> <p>8) Beberapa kali mendapatkan award dan nominasi untuk pembangunan e-govt.</p>	<p>tata cara memanfaatkan Internet dan layanan e-govt.</p> <p>3) Pengembangan TIK oleh swasta yang begitu cepat.</p> <p>4) Kondisi lingkungan untuk pembangunan infrastruktur jaringan.</p> <p>5) Tren dan perkembangan teknologi yang sangat cepat.</p>	<p>2) Optimalisasi pengadaan dan pemanfaatan sarana prasarana serta SDM TIK untuk pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK terpadu diseluruh SKPD dan unit kerja.</p> <p>3) Peningkatan jumlah dan kapabilitas SDM TIK untuk selalu mengikuti tren TIK.</p> <p>4) Koordinasi dan sinergi antar SKPD oleh Diskominfo untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi e-Government dan infrastruktur TIK terintegrasi.</p> <p>5) Koordinasi dan sinergi dengan SKPD pengelola infrastruktur kota, dan swasta untuk optimalisasi pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur jaringan TIK</p> <p>6) Adanya regulasi pengembangan dan penggunaan TIK yang berbasis Open Source serta mendukung lingkungan dan budaya Kota Denpasar.</p>
---	--	--

Kelemahan	Peluang	Strategi W - O
<p>1) Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antar SKPD untuk pembangunan e-govt.</p> <p>2) Belum cukupnya regulasi daerah untuk pembangunan e-govt.</p> <p>3) SDM TIK belum merata dan belum termanfaatkan dibidang TIK.</p> <p>4) Belum terintegrasinya pembangunan e-govt.</p> <p>5) Belum tersedianya sarana prasarana untuk memastikan Bussiness Continuity Plan terlaksana.</p>	<p>1) Peningkatan tuntutan kinerja Pemkot untuk layanan masyarakat yang baik</p> <p>2) Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional.</p> <p>3) Adanya indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dan peningkatan kesejahteraan kota.</p> <p>4) Peningkatan peran e-govt dalam membangun Smart City.</p> <p>5) Perhatian dan dorongan Pemerintah Pusat dan Swasta terhadap pengembangan e-government daerah.</p>	<p>1) Pengembangan aplikasi e-Government terintegrasi dalam bentuk sistem informasi manajemen, sistem informasi eksekutif dan pengambilan keputusan (dashboard eksekutif) diutamakan berbasis Open Source Software untuk peningkatan kinerja aparat pemkot, pengembangan dunia usaha dan layanan masyarakat</p> <p>2) Pengembangan website Pemkot yang terintegrasi dengan aplikasi / sistem informasi pelaporan, pengaduan, dan layanan masyarakat</p> <p>3) Pembenahan pengembangan dan pengelolaan bersama seluruh SKPD untuk mewujudkan Kota Denpasar sebagai Smart City sekaligus meraih penghargaan nasional bidang e-govt</p> <p>4) Pengembangan standar data dan pemetaan digital, aplikasi berbasis Open Source Software dan perangkat TIK Pemkot Denpasar.</p>

Kelemahan	Tantangan	Strategi W - T
<p>1) Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antar SKPD untuk pembangunan e-govt.</p> <p>2) Belum cukupnya regulasi daerah untuk pembangunan e-govt.</p> <p>3) SDM TIK belum merata dan belum termanfaatkan dibidang TIK.</p> <p>4) Belum terintegrasinya pembangunan e-govt.</p> <p>5) Belum tersedianya sarana prasarana untuk memastikan Bussiness Continuity Plan</p>	<p>1) Kesiambungan pembangunan e-govt akibat dinamika politik di pucuk pimpinan.</p> <p>2) Menanamkan kesadaran kepada publik tentang tata cara memanfaatkan Internet dan layanan e-govt.</p> <p>3) Pengembangan TIK oleh swasta yang begitu cepat.</p> <p>4) Kondisi lingkungan untuk pembangunan infrastruktur jaringan.</p> <p>5) Tren dan perkembangan teknologi yang sangat</p>	<p>1) Pengembangan infrastruktur TIK yang optimal untuk memberikan jaminan akses layanan TIK di seluruh unit kerja / SKPD dan layanan masyarakat.</p> <p>2) Koordinasi antar SKPD untuk sistem pengamanan informasi dan penyediaan layanan masyarakat.</p> <p>3) Sosialisasi pemahaman kepada seluruh stakeholder untuk semakin meningkatkan pemanfaatan TIK.</p> <p>4) Melengkapi investasi sarana prasarana TIK untuk menjamin keberlangsungan sistem dan meningkatkan sistem keamanan informasi.</p>

terlaksana.	cepat.	
-------------	--------	--

6.4. Analisis Strategi dan Kebijakan Implementasi

Setelah strategi dari analisa SWOT tersusun, maka perlu dilakukan kesesuaian antara tujuan dan sasaran dengan strategi tersebut seperti tertera pada Tabel 6.2. Kesesuaian ini diperlukan untuk menyusun program dan prioritas implementasi kegiatan pengembangan e-government Kota Denpasar selama 5 tahun yang akan dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Umumnya strategi penyusunan tahapan implementasi sebagai berikut.

- I. Tahun pertama dan tahun kedua akan difokuskan pada pementapan kebijakan, regulasi, dokumen pengembangan pengelolaan TIK, dan kelembagaan. Sehingga di tahun ke tiga hingga akhir tahun ke lima hanya perlu melakukan review, revisi minor, dan penambahan SOP seperlunya. Sedangkan untuk rekrutmen dan pengelolaan SDM lebih mengikuti prosedur umum yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat.
- II. Tiga tahun pertama dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 akan dilakukan penguatan dan pementapan infrastruktur hingga tercapai kondisi ideal untuk terjaminnya Business Continuity Plan. Selama lima tahun selalu dilaksanakan pemeliharaan dan penggantian perangkat yang sudah waktunya diganti berdasarkan umur efektif dan tingkat kerusakannya.
- III. Demikian juga dengan pengembangan Infostruktur (aplikasi e-Government), dimana pada tiga puluh (30) bulan atau dua setengah (2,5) tahun pertama akan dilakukan pementapan dan pematangan interoperabilitas sistem informasi dan aplikasi, arsitektur sistem terintegrasi, database terpadu, bisnis proses reengineering pada seluruh birokrasi, sosialisasi dan penyelenggaraan pilot project. Semua rancangan dan pengembangan diutamakan menggunakan free dan open source software. Selanjutnya 2,5 tahun berikutnya dilakukan kegiatan pengembangan sistem terintegrasi secara masif yang melibatkan seluruh SKPD.

Tabel 6.2. Perencanaan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pengembangan e-Government Pemkot Denpasar Tahun 2016 - Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Strategi	Dimensi
1. Terimplementasikannya e-government menuju good government	Melengkapi dokumen dan regulasi sinergi implementasi e-government terintegrasi	SO-1, SO-2, SO-3	Kebijakan
2. Optimasi pengorganisasian TIK Pemkot Denpasar	Meningkatnya pengelolaan TIK Pemkot Denpasar	SO-2, SO-3, SO-4	Kebijakan dan Kelembagaan
3. Terbangunnya jejaring pengembangan TIK	1) Jejaring internal / Intranet 2) Jejaring eksternal / Internet	SO-3, SO-5	Kebijakan dan Kelembagaan

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK	Meningkatnya SDM pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK	ST-2, ST-3	Kelembagaan
5. Meningkatkan budaya birokrasi berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan staf Pemkot untuk membangun e-government	Berubahnya proses birokrasi manual ke elektronik	SO-2, ST-2, WO-1, WO-2, WO-3, WO-4, WT-1, WT-4	Kebijakan, Kelembagaan, Aplikasi, Infrastruktur dan Perencanaan
6. Peningkatan efisiensi di semua anggaran rutin pemeliharaan dan pengadaan TIK	Meningkatnya efisiensi anggaran pembangunan dan pengadaan TIK Pemkot.	ST-1, ST-2, ST-4, ST-6	Kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi, Perencanaan
7. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan Internet / Intranet di Pemerintahan	Meningkatnya kecepatan Internet / Intranet di Pemerintahan	ST-2, WT – 1, WT – 4, WO-4	Infrastruktur
8. Meningkatnya pemanfaatan Internet / Intranet untuk pemerintahan	Meningkatnya jenis pemanfaatan Internet / Intranet	WO-1, WO-2, WO-3	Infrastruktur
9. Meningkatkan keamanan informasi	3) Pengamanan aset informasi pemerintah daerah 4) Kepedulian karyawan Pemkot pada isu keamanan informasi.	WT-2, WT-4	Infrastruktur, Aplikasi
10. Meningkatkan sarana prasarana pemanfaatan Internet di masyarakat	Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan Internet.	WO-1, WO-2, WT-1, WT-3	Infrastruktur, Aplikasi
11. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi / aplikasi dalam pemerintahan	1) Meningkatnya pemanfaatan aplikasi untuk tugas – tugas pemkot. 2) Meningkatnya jumlah layanan pemerintah berbasis elektronik	WO-1, WO-2, WO-3	Aplikasi
12. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan data elektronik pemerintah yang terintegrasi	Meningkatnya pemanfaatan pusat data	WO-1, WO-2, WO-4	Aplikasi
13. Meningkatkan pengawasan Pimpinan Daerah terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah	Meningkatnya kebijakan dan program yang tepat sasaran	SO-3, WO-1, WO-2	Kebijakan, Aplikasi
14. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan Pemkot	1) Meningkatnya kecepatan dan keakuratan informasi yang dihasilkan. 2) Meningkatnya kecepatan dalam pengambilan keputusan. 3) Meningkatnya kecepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan.	WT-1, WO-1, WO-2	Aplikasi
15. Meningkatkan sarana prasarana pemanfaatan TIK untuk pengawasan lingkungan Kota	Terwujudnya lingkungan kota yang bersih, tertib, aman, dan nyaman	S0-5, ST-5, ST-6, WO-3	Kebijakan, kelembagaan, aplikasi, Infrastruktur
16. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	Meningkatnya kecepatan pelayanan berbasis elektronik pada masyarakat	WO-2, WT-1, WT-4	Aplikasi dan Infrastruktur
17. Menngkatkan fasilitas pemanfaatan Internet di masyarakat	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan Internet.	WO-2, WT-1, WT-3, WT-4	Aplikasi dan Infrastruktur
18. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi / aplikasi dalam pelayanan publik	1) Meningkatnya pemanfaatan aplikasi 2) Meningkatnya jumlah layanan	WO-2, WT-1, WT-4	Aplikasi dan Infrastruktur

	pemerintah berbasis elektronis untuk masyarakat		
19. Meningkatkan pemanfaatan sistem informasi bagi usaha kecil dan menengah yang terintegrasi dengan layanan pemerintah	Meningkatnya transaksi elektronik untuk usaha kecil dan menengah	WO-1	Aplikasi
20. Meningkatkan UMKM kreatif berbasis TIK	Meningkatnya industri – industri kreatif yang memanfaatkan TIK	ST-6, WO-1, WO-3	Kebijakan, aplikasi
21. Meningkatkan nilai, keragaman, dan kekayaan budaya lokal	Berkembangnya nilai, keragaman, dan kekayaan budaya lokal	ST-6, WO-1, WO-2, WO-3, WT-1	Kebijakan, aplikasi, infrastruktur
22. Melestarikan nilai, keragaman, dan kekayaan budaya lokal	Eksistensi nilai, keragaman, dan kekayaan budaya lokal	ST-6, WO-1, WO-2, WO-3, WT-1	Kebijakan, aplikasi, infrastruktur
23. Meningkatkan pemantauan pemanfaatan TIK di masyarakat / dunia usaha	1) Meningkatkan Internet sehat. 2) Meningkatkan peran TIK untuk pemanfaatan dunia usaha dan layanan masyarakat.	ST-6, WO-1, WO-2, WT-3	Kebijakan, aplikasi, infrastruktur
24. Meningkatkan pemanfaatan TIK di masyarakat / dunia usaha	Meningkatnya penguasaan TIK oleh masyarakat	WO-3	Aplikasi
25. Meningkatkan penyediaan dan penyebaran informasi pembangunan	Meningkatnya frekuensi masyarakat yang mengakses informasi pembangunan	WO-1, WO-2	Aplikasi
26. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan Kota	Meningkatnya komunikasi masyarakat dengan pemerintah Kota	WO-1, WO-2	Aplikasi

6.5. Kebijakan Pengembangan E-Government

Sesuai dengan pemeringkatan oleh PeGI terdapat dimensi kebijakan, dimensi kelembagaan, dimensi infrastruktur, dimensi aplikasi, dan dimensi perencanaan. Berdasarkan Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang tersusun pada Tabel 6.2, maka kebijakan pengembangan e-government perlu dicermati berdasarkan kelima dimensi tersebut berikut ini.

Dimensi Kebijakan

Dimensi kebijakan ini perlu mendapat prioritas utama, karena keberhasilan pelaksanaan e-government untuk mewujudkan smart city sangat ditentukan oleh adanya regulasi yang baik sebagai landasan melakukan pengawasan dan tindakan jika terjadi kekeliruan. Untuk mereduksi resiko yang ditimbulkan atas lemahnya dimensi kebijakan ini, maka perlu langkah – langkah berikut.

- Mempercepat penyusunan kelengkapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-government/TIK Pemerintah Kota Denpasar.
- Penetapan semua dokumen yang diperlukan seperti dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Rencana Strategis, Framework e-government, dan semua SOP sebagai acuan dalam pengelolaan e-government Kota Denpasar.

- Mempercepat penerapan pengembangan e-government dalam birokrasi dengan mendorong perubahan proses birokrasi dan budaya kerja berbasis elektronik dengan menyusun aturan/kebijakan untuk transformasi proses birokrasi ini.
- Membangun dan memperkuat standardisasi pendelegasian tugas dan kewenangan pengembangan TIK kepada Diskominfo selaku koordinator dan seluruh SKPD sebagai salah satu upaya menuju efektifitas dan efisiensi pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan TIK di Pemkot Denpasar.
- Melakukan sosialisasi, kontrol dan monitoring atas kebijakan strategis yang sah untuk diimplementasikan, untuk memastikan bahwa kebijakan telah dilaksanakan dengan baik di seluruh SKPD.

Dimensi Kelembagaan

- Pembentukan organisasi fungsional CIO / Dewan TIK dimana kepala daerah atau minimal kepala SKPD eselon 2 yang kompeten untuk membuat kebijakan TIK yang memimpin secara langsung pengendalian pengembangan dan pemanfaatan TIK.
- Memperkuat peran lembaga pengelola Diskominfo yang secara khusus dan mandiri dalam pengelolaan e-Government untuk memudahkan koordinasi dengan SKPD lainnya dalam perencanaan, pengembangan, implementasi, dan pengelolaan TIK.
- Peningkatan kapabilitas SDM di bidang TIK baik Diskominfo maupun SKPD lainnya.
- Pengadaan dan pendistribusian SDM terkait TIK dikoordinasikan dengan Diskominfo berdasarkan jumlah, kualifikasi, dan pendidikan.
- Kebijakan legalitas pengelola TIK di SKPD.
- Pembentukan jenjang karir jabatan fungsional bagi SDM TIK.
- Perlunya pendampingan untuk pengembangan pengelolaan TIK.
- Pembentukan fungsi sistem Helpdesk terpadu dan satu pintu sehingga monitoring sistem jaringan SKPD baik jaringan eksternal maupun internal dilakukan secara cepat.

Dimensi Infrastruktur Jaringan

- Percepatan penyediaan jaringan backbone menggunakan Fiber Optic yang menjangkau seluruh SKPD & RSUD dan jaringan distribusi layanan masyarakat sampai dengan tingkat kelurahan/ puskesmas / banjar.
- Percepatan pengembangan dan pengelolaan Green Datacenter (NOC) dan Green Data recovery centre yang baik untuk menjamin availability dan peningkatan keamanan informasi.

- Pengembangan government cloud storage.
- Pemanfaatan Intranet (kabel dan seamless wifi) untuk komunikasi antar SKPD, kecamatan / kelurahan, puskesmas, dan RSUD.
- Adanya kebijakan standar pengelolaan infrastruktur TIK di SKPD.
- Adanya kebijakan manajemen bandwidth, Public Internet Protocol (IP) dan pemanfaatan akses internet untuk seluruh SKPD.
- Adanya akses wifi di ruang – ruang publik.
- Adanya infrastruktur TIK terpadu untuk monitoring dan pengelolaan kota guna mewujudkan Kota Cerdas.

Dimensi Aplikasi / Sistem Informasi

- Pengembangan dan pernyataan kepemilikan, pemanfaatan data / informasi dan aplikasi e-government yang terintegrasi dalam kerangka interoperabilitas.
- Untuk pengelolaan aset data dan informasi di Pemkot Denpasar, maka perlu kebijakan sentralisasi data dan informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data di SKPD pada datacenter Diskominfo.
- Setiap SKPD memiliki sistem informasi baik untuk layanan masyarakat (G2C), dunia usaha (G2B) maupun layanan internal (G2E), sesuai dengan prioritas kebutuhan secara bertahap, dimana pengembangan dan pengelolaannya tetap berkoordinasi dengan Diskominfo.
- Perlunya standardisasi metadata untuk pengembangan aplikasi dan pengelolaan data tunggal dalam rangka interoperabilitas.
- Kebijakan Open Source Software digunakan untuk pengembangan aplikasi dan Operating system server, sedangkan untuk klien/desktop boleh menggunakan software Legal.
- Percepatan pengembangan website SKPD yang terintegrasi, dengan kemampuan melakukan interaksi dan transaksi.

Dimensi Perencanaan

- Mempercepat penyusunan semua dokumen yang diperlukan seperti dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Rencana Strategis, Framework e-government, dan semua SOP.
- Penetapan dokumen Rencana Pengembangan e-Government ini digunakan sebagai bahan penyusunan RPJMD dan renstra SKPD terkait pengembangan e-govt.

- Penyusunan dokumen action plan untuk setiap kegiatan TIK yang berdampak luas terhadap kinerja SKPD.
- Segera disusun Business Continuity Plan untuk layanan infrastruktur TIK.
- Segera disusun dokumen kerangka kerja (framework) pengembangan e-govt. Kota Denpasar sebagai dasar penyusunan semua SOP.
- Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-government kepada level eksekutif.
- Adanya rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh SKPD dari Diskominfo.

6.6. Penetapan Skala Prioritas

Skala prioritas implementasi berurutan dari nomor satu (1) dan seterusnya, terpisah dalam dimensi pemeringkatan e-Government. Tabel 6.3 memperlihatkan skala prioritas berdasarkan dimensi kebijakan, dimensi kelembagaan, dimensi infrastruktur, dimensi aplikasi, dan dimensi perencanaan.

Tabel 6.3. Penetapan Prioritas Program E-Government Kota Denpasar

A. Dimensi Kebijakan

No.	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
1	Penetapan dan penyusunan kelengkapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-government/TIK Pemerintah Kota Denpasar.	Pengembangan e-government Kota Denpasar	Penyusunan regulasi implementasi e-Government	Perwali	Panduan hukum implementasi e-govt.
			Penyusunan regulasi rencana induk e-govt.	Perwali	Panduan Teknis hukum arah pengembangan e-govt.
			Penyusunan regulasi pengembangan dan pemanfaatan sarana - prasarana TIK terpadu, penggunaan Open Source Software untuk pengembangan aplikasi dan Operating system server, dan software legal untuk klien/desktop	Perwali	Panduan teknis hukum dan teknis pengembangan dan pemanfaatan sarana dan prasarana TIK Kota Denpasar

			Penyusunan regulasi metadata dan interoperabilitas data		Panduan teknis hukum dan teknis standarisasi data elektronik pemerintah kota
			Penyusunan regulasi pengelolaan aset maya daerah		Panduan teknis hukum dan teknis pengelolaan aset informasi daerah pemerintah kota
			Penyusunan kebijakan keamanan informasi		Panduan Hukum pengelolaan Keamanan Data / informasi pemerintah kota

No.	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
2	Penetapan semua dokumen yang diperlukan seperti dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Rencana Strategis, Framework e-government, dan semua SOP sebagai acuan dalam pengelolaan e-government Kota Denpasar.	Penyusunan semua dokumen perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan e-Government Kota Denpasar	Penetapan dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Rencana Strategis, Framework e-government.	Pengesahan oleh Walikota	
			Penyusunan SOP Pengelolaan Aplikasi dan Web Pemkot		Panduan Teknis pengelolaan Website dan subdomain pemerintah kota
			Penyusunan SOP Pengelolaan Sarana Prasarana TIK		Panduan Teknis pengelolaan Sarana Prasarana TIK pemerintah kota
			Penyusunan SOP Pengelolaan, kepemilikan Data, informasi dan Jaringan		Panduan Teknis Pengelolaan, kepemilikan Data, Informasi dan Jaringan pemerintah kota
			Penyusunan SOP Keamanan Data dan Jaringan		Panduan Teknis Pengelolaan Keamanan Data dan Jaringan pemerintah kota

			Penyusunan SOP Incident Handling		Panduan Teknis Incident Handling
			Penyusunan SOP Pengelolaan Data Centre (NOC)		Panduan Teknis pengelolaan Data Centre (NOC)

No.	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
3	Penetapan dan Penyusunan aturan perubahan atau transformasi proses birokrasi tradisional menjadi proses birokrasi berbasis elektronik	Program Pengembangan Kelembagaan TIK	Penyusunan regulasi otomatisasi proses birokrasi		Peningkatan kinerja PNS pemko dan peningkatan layanan Pemko pada masyarakat dan dunia usaha

No.	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
4	Penetapan standardisasi pendelegasian tugas dan kewenangan pengembangan TIK kepada Diskominfo selaku koordinator dan seluruh SKPD untuk efektifitas dan efisiensi e-government Kota Denpasar	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama TIK	Audit TIK Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi kinerja implementasi e-Government	Dokumen Audit Dokumen self assessment	Percepatan dan ketepatan implementasi e-Government

B. Dimensi Kelembagaan

No.	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
1	Pembentukan organisasi fungsional CIO / Dewan E-Government untuk membantu dalam membuat kebijakan pengembangan dan pelaksanaan e-govt.	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Pembentukan CIO/ Dewan TIK	Organisasi fungsional	Pengarah kebijakan e-government
2	Penguatan peran dalam pengelolaan e-Government untuk memudahkan koordinasi dengan semua SKPD/Badan/Unit kerja lainnya	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Restrukturisasi - Posisi eselon - Fungsi pengembangan TIK Tupoksi sebagai leading sector e-govt. Kebijakan bahwa Diskominfo sebagai leading	Re-organisasi Perwali	Efisiensi dan efektifitas implementasi egovernment

			sector pembangunan e-government. Kebijakan Pembentukan Jabatan Fungsional SDM pengelola TIK Kebijakan legalitas pengelola TIK di SKPD		
3	Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kapabilitas SDM di bidang TIK baik di Diskominfo maupun SKPD lainnya, serta pendistribusiannya	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Pengadaan SDM TIK Pelatihan TIK Distribusi SDM TIK Karir Kesejahteraan	Revitalisasi SDM	Efisiensi dan efektivitas implementasi e-government
4	Pembentukan fungsi sistem Helpdesk terpadu dan satu pintu sehingga monitoring sistem jaringan SKPD baik jaringan eksternal maupun internal dilakukan secara cepat.	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Restrukturisasi SKPD Kominfo	Revitalisasi fungsi pengelola TIK	Efisiensi dan efektivitas implementasi e-government
5	Pengadaan SDM TIK dan Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-government untuk jajaran pimpinan eksekutif dan legislatif	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Pendampingan oleh SDM TIK untuk jajaran pimpinan eksekutif dan legislatif Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-govt kepada level eksekutif dan legislatif	Sosialisasi dan Pendampingan	Pemahaman dan Pemanfaatan e-Government bagi Top level management secara berkelanjutan
	Pembinaan pemanfaatan TIK untuk masyarakat dan dunia usaha		Bimbingan teknis pemanfaatan TIK untuk UMKM	Bimtek	Peningkatan Industri kreatif berbasis TIK

C. Dimensi Infrastruktur Jaringan

No.	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
1	Percepatan penyediaan jaringan backbone Fiber Optic seluruh SKPD, kecamatan, dan RSUD, serta jaringan distribusi	Pengembangan Sarana dan Prasarana TIK	Peningkatan layanan infrastruktur TIK untuk semua SKPD, RSUD, kecamatan	Jaringan Backbone Fiber Optik Optimasi Jaringan distribusi ke kelurahan dan psukesmas	Peningkatan layanan infrastruktur TIK
2	Percepatan pengembangan dan		Pembangunan Green data center	Peningkatan layanan	Peningkatan jaminan

	pengelolaan Green Datacenter (NOC) dan Green Data recovery centre untuk menjamin availability dan keamanan informasi		dan Green data recovery	infrastruktur internal	availability akses dan pengamanan informasi
3	Pengembangan government cloud storage		Pembangunan cloud storage	Peningkatan layanan infrastruktur	Peningkatan jaminan availability akses
4	Pemanfaatan Intranet (kabel dan seamless wifi) untuk komunikasi antar SKPD, kecamatan / kelurahan, puskesmas, dan RSUD.		Pengadaan perangkat komunikasi berbasis intranet	Aplikasi komunikasi	Peningkatan kinerja PNS dan layanan masyarakat
5	Pelaksanaan Kebijakan standar pengelolaan infrastruktur TIK di SKPD, termasuk kebijakan manajemen bandwidth, Public Internet Protocol (IP) dan akses internet untuk seluruh SKPD		Kegiatan rutin pengadaan, pemeliharaan infrastruktur TIK, dan pengamanan informasi yang mengacu pada SOP	Pemeliharaan rutin Pelaksanaan manajemen keamanan informasi	Peningkatan jaminan availability akses dan pengamanan informasi Implementasi SOP
6	Adanya infrastruktur TIK terpadu untuk monitoring dan pengelolaan kota guna mewujudkan Kota Cerdas, seperti akses wifi di ruang – ruang publik.		Peningkatan Layanan berbasis TIK untuk pengelolaan kota yang lebih baik dan layanan publik	Jaringan TIK di ruang publik (akses wifi, informasi, CCTV / IP Camera, sensor, dll.)	Smart City

D. Dimensi Aplikasi / Sistem Informasi

No.	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
1	Penyusunan Tata Kelola Data, Informasi, Aplikasi, dan infrastruktur terintegrasi dalam kerangka interoperabilitas	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik terintegrasi	Pemetaan data SKPD Standardisasi metadata untuk pengembangan aplikasi Koordinasi Pengelolaan Data SOP pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi	Peta dan inventarisasi Data, aplikasi, Pemkot Pengelolaan data tunggal	Pelaksanaan kebijakan data tunggal pemkot
	Kebijakan sentralisasi data dan informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data di SKPD pada datacenter Diskominfo	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik terintegrasi	Backup Data semua SKPD dan koordinasi Pengelolaan Data	Pengamanan data pemkot	Pelaksanaan kebijakan pengamanan data pemerintah
	Pengembangan sistem informasi terintegrasi semua SKPD untuk layanan masyarakat	Pengembangan Aplikasi dan Data Eletronik terintegrasi	Pengembangan aplikasi e-Government klaster	Aplikasi e-Government klaster Administrasi	i-Government

	(G2C), dunia usaha (G2B) maupun layanan internal (G2E), sesuai dengan prioritas kebutuhan secara bertahap, dimana pengembangan dan pengelolaannya tetap berkoordinasi dengan Diskominfo		Administrasi dan manajemen umum Klaster keuangan Klaster pembangunan Klaster layanan masyarakat Klaster kepegawaian Klaster legislasi	dan manajemen umum Klaster keuangan Klaster pembangunan Klaster layanan masyarakat Klaster kepegawaian Klaster legislasi	
	Percepatan pengembangan website dengan sub-domain semua SKPD/Badan/Unit kerja Pemkot yang terintegrasi, dengan kemampuan melakukan interaksi dan transaksi		Pengembangan Website fase transaksi	Fitur transaksi pada website	Tingkat kepuasan masyarakat akan layanan e-govt. Pemkot Denpasar
	Pengembangan sistem complaint resolution pembangunan Kota	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Pembangunan aplikasi keluhan warga dan forum diskusi warga	Modul keluhan warga dan forum diskusi warga	Peningkatan peran warga dalam membangun kota
	Pengembangan kualitas dan kuantitas penyediaan informasi pembangunan	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Koordinasi dan konsolidasi penetapan dokumen standar informasi publik	Dokumen standar layanan informasi publik	Pedoman layanan informasi publik

E. Dimensi Perencanaan

No.	Kebijakan	Program	Kegiatan	Output	Outcome
	Penyusunan semua dokumen perencanaan untuk bahan penyusunan RPJMD dan renstra SKPD terkait pengembangan e-govt dan ditetapkan melalui Perwali	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Rencana Strategis, dan Framework e-government	Pengesahan semua dokumen oleh walikota	Pedoman pembangunan e-government Kota Denpasar
	Penyusunan Business Continuity Plan layanan e-govt.	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama Komunikasi dan Informatika	Penyusunan dokumen Business Continuity Plan layanan e-govt.	Dokumen Business Continuity Plan layanan e-govt.	Pedoman pelaksanaan layanan infrastruktur TIK dan cara pelaksanaan apabila terjadi insiden
	Rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK untuk seluruh SKPD	Program Pengembangan Kelembagaan dan Kerjasama	Penyusunan dokumen petunjuk teknis / standar	Dokumen petunjuk teknis /standar biaya kegiatan terkait	Pedoman belanja dan kegiatan terkait

	dari Diskominfo.	Komunikasi dan Informatika	biaya kegiatan terkait pengembangan TIK	pengembangan TIK	pengembangan e-government
--	------------------	----------------------------	---	------------------	---------------------------

6.7. Tahapan Implementasi

Tabel 6.3. Penetapan Prioritas Program E-Government Kota Denpasar

A. Dimensi Kebijakan

No.	Program	Tahun Implementasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penetapan regulasi pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan e-government/TIK terpadu Pemerintah Kota Denpasar	√	√			
	Penetapan regulasi penggunaan Open Source Software untuk pengembangan aplikasi dan Operating system server, dan software legal untuk klien/desktop	√	√			
2	Penetapan semua dokumen acuan pengembangan dan pengelolaan e-government Kota Denpasar.	√	√			
3	Penetapan regulasi transformasi proses birokrasi tradisional menjadi proses birokrasi berbasis elektronik	√	√			
4	Penetapan sentralisasi dan desentralisasi kewenangan pengelola TIK Pemkot Denpasar	√				

B. Dimensi Kelembagaan

No.	Program	Tahun Implementasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pembentukan organisasi fungsional CIO / Dewan E-Govt.			√		
2	Restrukturisasi Diskominfo untuk penguatan peran Diskominfo dalam pengelolaan e-Government untuk memudahkan koordinasi dengan semua SKPD/Badan/Unit kerja lainnya	√				
3	Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kapabilitas SDM TIK di Diskominfo dan semua SKPD / Badan/ unit lainnya, serta pendistribusiannya (jumlah, kualifikasi, pendidikan)		√			
4	Pembentukan sistem Helpdesk terpadu dan monitoring sistem jaringan semua SKPD dilakukan secara cepat.	√				
5	Diseminasi pengembangan dan pemanfaatan e-government untuk jajaran pimpinan eksekutif dan legislatif	√	√	√	√	√
6	Pembinaan pemanfaatan TIK untuk masyarakat dan dunia usaha	√	√	√	√	√

C. Dimensi Infrastruktur Jaringan

No.	Program	Tahun Implementasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Percepatan penyediaan jaringan backbone Fiber Optic seluruh SKPD, kecamatan, dan RSUD, serta jaringan distribusi	√	√	√	√	√
2	Percepatan pengembangan dan pengelolaan Green Datacenter (NOC) dan Green Data recovery centre untuk menjamin availability dan keamanan informasi	√	√	√	√	√
3	Pengembangan government cloud storage			√	√	√
4	Pemanfaatan Intranet (kabel dan seamless wifi) untuk komunikasi antar SKPD, kecamatan / kelurahan, puskesmas, dan RSUD.	√	√	√	√	√
5	Pelaksanaan Kebijakan standar pengelolaan infrastruktur TIK di	√				

Rencana Induk Pengembangan e-Government Diskominfo Pemerintah Kota Denpasar
Tahun 2016 – Tahun 2020

	SKPD, termasuk kebijakan manajemen bandwidth, Public Internet Protocol (IP) dan akses internet untuk seluruh SKPD					
6	Adanya infrastruktur TIK terpadu untuk monitoring dan pengelolaan kota guna mewujudkan Kota Cerdas, seperti akses wifi di ruang – ruang publik.	√	√	√	√	√

D. Dimensi Aplikasi / Sistem Informasi

No.	Program	Tahun Implementasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Adanya Tata Kelola (kepemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan)Data, Informasi, Aplikasi, dan infrastruktur terintegrasi	√	√			
	Kebijakan sentralisasi data dan informasi pada datacenter Diskominfo	√				
	Pengembangan sistem informasi terintegrasi semua SKPD untuk layanan masyarakat (G2C), dunia usaha (G2B) maupun layanan internal (G2E) dengan koordinasi Diskominfo	√	√	√	√	√
	<i>Redevelopment</i> website dengan sub-domain semua SKPD terintegrasi dengan kemampuan transaksi	√	√	√	√	√
	Adanya sistem complaint resolution pembangunan Kota	√	√			
	Peningkatan kualitas dan kuantitas informasi pembangunan		√	√	√	√

E. Dimensi Perencanaan

No.	Program	Tahun Implementasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Penetapan dan lengkapnya dokumen perencanaan untuk acuan penyusunan RPJMD dan renstra semua SKPD	√				
	Adanya Business Continuity Plan layanan dan action plan e-govt.	√	√	√		
	Penetapan rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan TIK seluruh SKPD dari Diskominfo.	√	√	√	√	√